



LIMA GAGASAN YANG DAPAT MENGUBAH INDONESIA

M. SASTRAPRATEDJA, S.J.

Sekapur Sirih dari Jakob Oetama



PUSAT KAJIAN FILSAFAT DAN PANCASILA
JAKARTA
2013

**LIMA GAGASAN YANG
DAPAT MENGUBAH
INDONESIA**

M. Sastrapratedja, S.J.

Sekapur Sirih dari Jakob Oetama

**Pusat Kajian Filsafat dan Pancasila
Jakarta
2013**

Lima Gagasan yang dapat Mengubah Indonesia

Pusat Kajian Filsafat dan Pancasila
©Jakarta, 2013

Alamat:

M. Sastrapratedja, S.J.

Jl. Cempaka Putih Indah 100A

Jembatan Serong, Rawasari

JAKARTA 10520

Tel. (021) 4247129; Fax. (021) 4224866

Gambar Sampul: Desain oleh Retno Triharjanti.

Beberapa tokoh dalam rapat BPUPKI, dimana Ir. Soekarno mengucapkan pidato "Lahirnya Pancasila".

Cetakan Pertama

ISBN 978-602-19830-3-4

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun, termasuk fotokopi, tanpa izin tertulis dari penerbit.

SEKAPUR SIRIH JAKOB OETAMA

KEHORMATAN dan senang hati memenuhi permintaan Romo M. Sastrapratedja SJ, penulis buku ini, untuk memberikan sekapur sirih. Terhormat, sebab saya tidak memiliki disiplin ilmu filsafat yang mendasari kumpulan ceramahnya mengenai Filsafat Pancasila, yang pernah disampaikan dalam berbagai kesempatan; terangkum dalam judul *Lima Gagasan yang Dapat Mengubah Indonesia*.

Semula saya punya pandangan Pancasila sudah selesai, sudah *taken for granted*, sudah *given*, dalam arti tinggal dilaksanakan. Persoalan terletak pada penjabaran yang perlu terus disesuaikan dengan perkembangan zaman sekaligus diterapkan sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara.

Rumusan lima sila pertama kali disampaikan Ir. Soekarno dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 1 Juni 1945. Rumusan itu dia gali selama pengasingan di Ende tahun 1934-38, masa pemulihan dari keterpurukannya sampai harus "minta maaf" pada Belanda menjadi seorang *the state ideologist* menurut istilah Daniel Dhakidae. Pendasaran filosofis dilakukan sejumlah ahli di antaranya Prof Notonagoro dan Prof Driyarkara yang menyebutnya Pancasila sebagai ideologi terbuka. Kisah "jatuh-bangun" Pancasila sejak 1945 sampai 2013 menunjukkan persoalan tidak pada faktor ideologi tetapi pada niat baik dan keputusan politik. Ujung-ujungnya tidak terimplikasinya dalam praksis pemerintahan dan perilaku masyarakat sehari-hari.

Pancasila adalah ideologi negara. Kelima sila Pancasila, menurut Sastrapratedja sebagai "lima gagasan" yang mengubah Indonesia ke masa depan yang lebih baik kalau prinsip-prinsipnya diterapkan dalam mengambil kebijakan publik. Prinsip-prinsip itu tidak pernah diterapkan. Setelah merdeka, Indonesia disibukkan dengan konsolidasi. Di masa Orde Baru dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis-pragmatis. Di masa Reformasi 1998 dan sesudahnya dilupakan.

Keprihatinan publik kurang diperhatikan. Saya berpandangan, persoalan lebih pada penerapan prinsip-prinsip, bukan pada historisitas dan arkeologi pemikiran. Pancasila sebagai ideologi terbuka, bagi saya, tidak terutama pada sisi-sisi kedalaman tetapi pada sisi praksis yang dalam penerapannya disesuaikan dengan perkembangan. Itulah tantangan besar yang sangat tergantung dari praksis pemerintahan setiap kurun waktu.

Akan tetapi sebenarnya saya pun merasa, fondasi Keindonesiaan yang dibangun atas kondisi kemajemukan bagi sebuah negara dengan wawasan kebangsaan yang mengatasi golongan dan kelompok etnis, agama dan daerah, tidak lekang dari perpecahan. Pancasila menyediakan tempat sebagai rumah bersama yang membikin betah seluruh warga bangsa; kondisi yang perlu terus kita perkokoh agar semakin aman sentosa dan adil-sejantera.

Dengan pemerian demikian, menurut saya mengembangkan dan mengaktualisasi Pancasila merupakan *conditio sine qua non*, harus tidak harus ya harus, dengan batu sendi sekaligus batu penjuru bangunan sebuah negara dengan Pancasila, berikut pilar-pilarnya seperti Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945, dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Memperkokoh negara bangsa Indonesia, artinya mengembangkan budaya politik Pancasila – yang tidak hanya

jadi jargon seperti pada era masa lalu, tetapi menjadi habitus (Pierre Bourdieu: orientasi yang ajek bagi pelaku individu dan masyarakat), tetapi perlu dikontekstualisasikan dan diimplementasikan dengan berbagai dimensi seperti interpretasi, sosialisasi, dan institusionalisasi (Hal. 2 di buku ini).

Dalam konteks itu kita apresiasi eksisnya sejumlah lembaga pusat studi atau pusat kajian filsafat Pancasila baik yang berlandung di bawah lembaga pendidikan tinggi seperti di UGM, Yogyakarta maupun Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, maupun yang independen seperti Pusat Kajian Filsafat dan Pancasila, Jakarta. Lewat kajian, terbitan dan diskusi terus dihidup-hidupkan dan diaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. Arahnya memberikan teguran-teguran alternative. Pancasila tidak cukup hanya diakui sebagai dasar negara tetapi menjadi pedoman bagi kebijakan politik dan perilaku berpemerintahan dan bermasyarakat. Kehadiran lembaga-lembaga serupa justru semakin mendesak dikembangkan dalam era sekarang, ketika lembaga pemerintah seperti BP7 kurang bunyi. Pancasila dengan lima gagasan yang mengubah—terumus dalam kelima silanya—semakin terpinggirkan.

Kegunaan Kajian Filosofis

Latar belakang pendidikan saya, ilmu komunikasi, memberikan pendasaran dan pememkayaan profesi saya sebagai wartawan sejak tahun 50-an. Profesi jurnalistik itu menawarkan jalan keluar dan mengajak orang terbuka terhadap orang lain, terhadap persoalan yang mungkin keluar dari *mainstream*. Sebaliknya filsafat yang dipakai sebagai dasar makalah-makalah dalam buku ini lebih memberikan penjelasan (*explanation*) daripada memberikan solusi (*solution*).

Ilmu sejarah, jenjang pendidikan tinggi pertama yang saya peroleh sambil mengembangkan karier jurnalistik, disiplin ilmu yang saya rasa menunjang sisi perspektif dalam setiap mendudukan persoalan. Sedangkan ilmu filsafat melatih naluri ketajaman dan kejelasan, di samping kepekaan terhadap segala persoalan yang sebenarnya bermuara pada manusia dan kemanusiaan.

Diuntungkan oleh buku-buku babon ilmu komunikasi dengan nama-nama besar yang saya baca teliti terbitan 50-an hingga tahun 80-an, saya merasa bertemunya ilmu filsafat dalam berbagai bidangnya seperti antropologi filsafat yang konon spekulatif dengan ilmu-ilmu positif termasuk ilmu komunikasi. Menurut pengalaman saya, para penulis buku-buku klasik jurnalistik dan jurnalisme tersebut mampu menjelaskan secara logis, transparan, mendalam, berperspektif, menjebol persoalan dari bawah permukaan yang tidak mungkin dilakukan oleh ilmu-ilmu positif seperti ilmu komunikasi. Tanpa sadar, meskipun tidak khusus mendalami ilmu-ilmu filsafat, saya mendapatkan sumbangan besar dari filsafat.

Ketika kami, saya dan Sdr Petrus Kanisius Ojong merintis Kompas Gramedia dengan Majalah *Intisari* tahun 1963, kemudian terutama Harian *Kompas* tahun 1965, tanpa saya sadari perspektif kefilosofatan terejawantahkan dalam rumusan dasar usaha kami. Manusia adalah "sesamaku". Bukankah itu rumusan filosofis " yang mengatakan "aku tanpa yang lain", *I and Thou*, seperti rumusan filsuf Martin Buber? Resiprositas saling "membuat ada" atau "saling mengada" menurut istilah Drijarkara eksistensi selalu koeksistensi, sebaliknya bisa "ada dan tiada", saling mengada sekaligus saling meniadakan dalam pandangan Sartre – sekadar rumus-rumus filsafat yang tentu saja mempertajam rumusan-rumusan politis seperti kemajemukan Indonesia. Rumusan humanisme transendental atau

kemanusiaan yang beriman, istilah kami, pun terpengaruh dan terinspirasi ilmu filsafat. Humanisme adalah kosa kata filsafat, begitu juga transendensi yang diperlawankan dengan imanensi.

Pengantar di atas sekadar memperteguh keyakinan tentang kegunaan ilmu filsafat dalam menunjang karya jurnalistik saya selama ini, dalam hal buku ini termasuk telaan filosofis Pancasila. Latar belakang pendidikan menengah saya, seminari menengah atas di mana terlatih untuk melakukan refleksi, membuat siapa pun tanpa sadar "berfilsafat". Memberi makna atas fakta dan peristiwa jatidiri profesi jurnalistik pun bersentuhan dan berkelindan dengan disiplin ilmu filsafat. Karena tidak diperlengkapi dengan metodologi ilmunya, tentu tidak semendalam dan seintensif mereka yang mengkhususkan diri belajar ilmu filsafat. Katakanlah, jatidiri wartawan yang selalu bertanya, menggoyang-nggoyangkan diri dan menggugat, lebih tepatnya "berfalsafah" juga.

Sering saya sarankan wartawan-wartawan muda *Kompas* yang umumnya berangkat dan kuat di bidang ilmu-ilmu positif, mengikuti kuliah-kuliah kapita selekta ilmu-ilmu kemanusiaan (*humaniora*) seperti antropologi, kosmologi, epistemologi, dan logika. Harapan saya, disiplin ilmu-ilmu spekulatif itu bisa memperkaya dan mempertajam kemampuan melihat persoalan dari segala dimensi, sekaligus melengkapi profesi mereka dalam memberi nuansa kemanusiaan.

Dalam konteks jasa ilmu filsafat, seperti dalam kumpulan buku ini, terletak strategisnya peranan filsafat Pancasila. Dan, buku ini tidak terdegradasi oleh sifat makalah yang ditulis untuk keperluan tertentu dan fokus tertentu. Ke-23 makalah ditulis amat serius, mendalam, dan terfokus. Menurut saya terpenuhi keinginan Romo Sastrapratedja. Buku ini menyumbang diskusi mengenai Pancasila. Secara pribadi

pun, saya tergerak meninjau kembali pandangan saya bahwa masalah Pancasila tinggal pada penerapan prinsip-prinsipnya. Ada yang masih bisa dilakukan, yakni telaah kedalaman yang amat dibantu lewat ilmu filsafat.

Jakarta, 2 Juli 2013

PENGANTAR

Sampul depan *Time*, October 1, 2012 memuat judul: "5 Ideas that are changing the World (for better)", suatu artikel yang ditulis oleh Bill Clinton. Clinton menyebut tiga tantangan besar dalam dunia yang menjadi semakin tergantung: *inequality*, *instability* dan *unsustainability*. Kita di Indonesia menghadapi tantangan yang sama, *inequality*, ketidakmerataan dan ketidaksetaraan dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya; *instability*, kondisi politik yang tidak stabil, konflik sosial antaretnik, antaragama, perubahan yang diakibatkan oleh krisis ekonomi global, kekerasan yang merembet kemana-mana dan kepemimpinan nasional yang tidak mampu memberi arah kemana masa depan bangsa dan negara kita. Kita menghadapi pula *unsustainability*, daya dukung lingkungan yang semakin melemah, enersi yang tidak dapat diperbaharui hanya tinggal menghitung beberapa tahun, sementara enersi alternatif yang dapat diperbaharui masih jauh dari realisasi, ditambah dengan perubahan iklim dan pemanasan global. Clinton menyebut lima hal yang menggerakkan dan mengubah dunia: *justice*, *equality*, *technology*, *economy* dan *health*.

Dapatkah kita juga mengatakan bahwa kita memiliki "lima gagasan", yaitu Pancasila, yang dapat mengubah, atau memperkuat bangsa dan negara Indonesia menjadi lebih baik?

Berbagai tulisan berikut mau menunjukkan bahwa "Lima Prinsip" yang termuat dalam Pancasila dapat "mengubah" wajah Indonesia dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan.

Pancasila telah membawa perubahan besar bagi Indonesia. *Pertama-tama* Pancasila telah menjadi dasar dari bangunan negara

dan bangsa Indonesia. Negara dan bangsa Indonesia adalah bangsa dan negara yang menghormati serta mengakui agama-agama dan kebebasan beragama. Maka negara dan bangsa Indonesia menjunjung tinggi dimensi spiritual manusia yang terdalam. *Kedua*, bangsa dan negara Indonesia menempatkan kemanusiaan sebagai prinsip kehidupan negara dan bangsa. Nilai-nilai kemanusiaan sebagai prinsip kehidupan itu bertumpu pada martabat manusia. Ada dua aspek dari martabat manusia yaitu "memberdayakan" (*empowering*). Ini berarti bahwa martabat manusia menuntut dilaksanakan nilai-nilai kemanusiaan seperti misalnya Hak-Hak Asasi Manusia. Aspek kedua martabat manusia "mencegah" (*constraint*) untuk merendahkan manusia (*dehumanisasi*). *Ketiga*, persatuan menjadi prinsip dalam membangun negara dan bangsa. Prinsip kesatuan membawa kewajiban untuk menjaga keutuhan sebagai negara dan bangsa; mengutamakan persatuan, seraya merawat keragaman; menjauhkan diri dari segmentasi atau pengkotak-kotakan masyarakat. Itu semua dapat disebut nasionalisme. *Keempat*, dalam mengambil keputusan mengenai hal-hal yang akan menentukan hajat hidup rakyat diutamakan musyawarah. Inilah ciri khas demokrasi Indonesia. Tetapi demokrasi harus juga menghormati hukum. *Kelima*, sila terakhir dari Pancasila merupakan alasan terpenting dari usaha membangun negara dan bangsa Indonesia, yaitu agar setiap warga mendapatkan keadilan dan kesejahteraan.

Pancasila telah membawa perubahan bagi bangsa dan negara Indonesia dan perubahan ke arah masa depan yang lebih baik akan terjadi kalau prinsip-prinsip itu diterapkan dalam mengambil kebijakan publik.

Penerbitan buku ini dimungkinkan atas kebaikan hati Sdr. **Retno** Triharjanti yang telah mempersiapkan naskah ini dan Bapak **Oey** Shandy Witanto yang telah berbaik hati mencetak buku ini.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih atas "Sekapur **Sirih**" dari Bapak Jakob Oetama. Pengalaman beliau dalam mengamati kehidupan politik Indonesia dan wawasan kenegaraan beliau tak diragukan lagi.

Jakarta, Juni 2013

M. Sastrapratedja, SJ

DAFTAR ISI

SEKAPUR SIRIH	iii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
Bab 1	
PANCASILA SEBAGAI PRINSIP HUMANISASI	
MASYARAKAT	1
Bab 2	
PANCASILA SEBAGAI ORIENTASI PEMBANGUNAN	
BANGSA DAN PENGEMBANGAN ETIKA ILMU	
PENGETAHUAN	17
Bab 3	
MEMBANGUN JATI DIRI MANUSIA INDONESIA	
DAN KEHIDUPAN BERBANGSA	39
Bab 4	
PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA	51
Bab 5	
KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB	
SEBAGAI PRINSIP PEMANUSIAWAN	
MASYARAKAT*	69
Bab 6.	
ASPEK-ASPEK NASIONALISME	79
Bab 7	
POLITIK, DEMOKRASI DAN ETIKA	101
Bab 8	
PEMAHAMAN ETIKA SOLIDARITAS DAN	
KOMPETISI DALAM GLOBALISASI	121

Bab 9	PERMASALAHAN POLITIK KEBANGSAAN DAN ETNISITAS: INTEGRASI DAN DISINTEGRASI	137
Bab 10	PERKEMBANGAN SISTEM LEGITIMASI KEKUASAAN POLITIK	157
Bab 11	FUNGSI AGAMA SEBAGAI PEREKAT INTEGRASI BANGSA	171
Bab 12	PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI DALAM KEHIDUPAN BUDAYA	179
Bab 13	BUDAYA DAN PEMBENTUKAN KARAKTER SERTA JATIDIRI BANGSA	205
Bab 14	PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, ASAS ETIKA POLITIK DAN ACUAN KRITIK IDEOLOGI	221
Bab 15	PEMBANGUNAN BUDAYA POLITIK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	235
Bab 16	KEBUDAYAAN INDONESIA DAN TANTANGAN GLOBALISASI	257
Bab 17	KRISIS DAN KRITIK ATAS MODERNITAS	271

Bab 18

TREND PERKEMBANGAN IDEOLOGI DEWASA INI	285
A. Pengertian Ideologi	285
B. Gejala Globalisasi	292
C. Berbagai Versi Marxisme	295
D. Perkembangan Sosialisme - Kapitalisme	306
E. Beberapa Tema Ideologis Masa Kini	318
F. Ideologi dalam Perspektif Pancasila	325

Bab 19

TRANSFORMASI BUDAYA MENUJU PEMERATAAN DAN KEADILAN, SUATU TINJAUAN ETIS	331
A. Dimensi Etis dari Ekonomi	332
B. Keadilan Ekonomis	338
C. Nilai-Nilai Ekonomis dan Nilai-Nilai Moral	341
D. Keadilan Politik	342
E. Mencari Sistem yang Menjamin Keadilan	343
F. Transformasi Budaya	344

Bab 20

PANCASILA DITINJAU DARI ASPEK ETIS	349
--	-----

Bab 21

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PENDIDIKAN POLITIK	365
--	-----

Bab 22

KEAMANAN PANGAN DAN NILAI-NILAI PANCASILA SUATU PENDEKATAN ETIS	375
--	-----

Bab 23

PENGAMALAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM RANGKA MENANGKAL KEGAGALAN NEGARA	385
---	-----

Indeks	395
--------------	-----